

Fintech dan Reformasi Pengawasan

By Steve Antero

Fintech dan Ketimpangan Regulasi: Antara Kepastian dan Keadilan

Fintech lahir dengan tujuan mulia: membuka akses keuangan untuk mereka yang terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional. Namun, dalam praktiknya, banyak platform justru menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus bunga tinggi dan tekanan penagihan yang tidak manusiawi.

Contoh nyata: seorang masyarakat meminjam Rp1,000,000 pada 2 Juni 2025, sudah ditagih hampir Rp936,000 pada 16 Juni 2025— padahal baru dua minggu berlalu. Walaupun secara hukum platform tidak dapat disalahkan karena manfaat ekonominya tidak melewati batas yang ditentukan tetapi sistem seperti ini jelas tidak adil, bahkan bagi masyarakat yang memang butuh dana cepat. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) acapkali menganggap ini sebagai salah satu cara mitigasi risiko dari platform, hal ini tercermin dari belum adanya payung hukum yang jelas akan hal ini, berbeda dengan manfaat ekonomi yang sudah dibatasi (tetapi itu pun direvisi kembali dengan tidak dilaksanakannya keputusan untuk manfaat ekonomi 0,2% pada tahun 2025), entah apakah manfaat ekonomi 0,1% pada tahun 2026 dapat terlaksana atau tidak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator acapkali dianggap tidak cukup tegas dalam perlindungan kepada masyarakat. Alih-alih melindungi korban, OJK lebih sering meminta masyarakat hanya mengisi formulir pengaduan — tanpa jaminan tindak lanjut yang nyata. Hal ini memperkuat kesan bahwa OJK lebih dekat dengan pelaku usaha dibanding korban fintech. Bahkan, data-data pelaporan OJK tidak bisa divalidasi oleh publik. Transparansi minim, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan negara kian menurun.

Faktanya, menurut laporan berbagai media, ribuan pengaduan masyarakat masuk ke OJK setiap tahun, terutama terkait pinjaman online. Namun, masyarakat mengeluhkan bahwa pengaduan hanya berhenti di tahap pengisian formulir, tanpa kepastian proses hukum atau perlindungan yang konkret. Banyak korban merasa pengaduan mereka tidak pernah ditanggapi serius, apalagi diselesaikan secara adil sehingga semua terkesan hanya formalitas semata.

Fintech dan Reformasi Pengawasan

By Steve Antero

True Story: Ketika Fintech Berujung Tragis

Kisah-kisah korban pinjol bukan hanya rekaan atau asumsi belaka. Pada tahun 2023 saja, publik digegerkan oleh kasus seorang pemuda yang bunuh diri setelah diteror pinjol. Dalam kasus ini, ia meminjam uang dalam jumlah kecil, namun dalam waktu singkat tagihannya membengkak. Bukan hanya itu, pihak pinjol mengirim pesan-pesan intimidatif kepada kontak keluarganya, bahkan menyebarkan foto-foto pribadi secara tidak sah. Tekanan mental yang terus-menerus membuat korban akhirnya mengakhiri hidupnya.

Kasus lain melibatkan seorang ibu rumah tangga di Jawa Tengah yang mengaku meminjam Rp2 juta, namun dalam 21 hari harus membayar hampir Rp5 juta karena akumulasi denda, bunga, dan biaya layanan. Ia mengaku dijadikan bahan lelucon di grup keluarga karena disebar foto-foto oleh debt collector aplikasi tersebut.

Laporan-laporan semacam ini banyak beredar di media sosial, terutama Twitter (X), TikTok, dan Facebook. Banyak korban yang berani speak-up, namun tak sedikit pula yang memilih diam karena malu atau takut.

Fintech dan Reformasi Pengawasan

By Steve Antero

Gagasan Reformasi: Komisi Khusus Fintech Nasional sebagai Lapis Pengawasan Baru

Untuk mengimbangi kekuatan regulator dan pelaku usaha, diperlukan struktur pengawasan yang lebih membumi dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Inilah gagasan membentuk Komisi Khusus Fintech dibawah Presiden dan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Daerah yang ditunjuk, yaitu lembaga bantuan hukum khusus fintech yang akan :

- Menangani aduan korban fintech langsung di kota/kabupaten
- Memverifikasi apakah laporan benar atau manipulatif
- Memberikan pendampingan hukum dan edukasi
- Mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi nasional

Namun, agar tidak terjebak menjadi lembaga administratif semata, struktur ini harus memiliki jalur komando dan pelaporan yang kuat, hingga ke tingkat nasional dan lembaga legislatif.

Fintech dan Reformasi Pengawasan

By Steve Antero

Struktur Usulan: Komisi Khusus Fintech Nasional

1. Presiden Republik Indonesia

- Menerima laporan resmi dari Komisi Khusus Fintech Nasional

2. Komisi Khusus Fintech Nasional

- Dibentuk langsung oleh Presiden
- Menunjuk dan mengkoordinasi LBH Khusus Fintech
- Merangkum laporan dari daerah secara berkala
- Memberikan laporan berkala kepada Presiden dan DPR

3. LBH Khusus Fintech

- Menerima pengaduan langsung secara offline
- Memvalidasi bukti dan niat dari pelapor
- Memberi bantuan hukum kepada korban sah

4. DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat)

- Menjadi pengawas independen terhadap Komisi Khusus
- Menggunakan data laporan sebagai bahan evaluasi OJK dan industri

Fintech dan Reformasi Pengawasan

By Steve Antero

Mekanisme Kerja

- Masyarakat melapor ke LBH Khusus Fintech
- LBH memverifikasi dan mendampingi korban
- Data dikirim ke Komisi Khusus Fintech Nasional
- Laporan berkala dikirim ke Presiden dan DPR
- Digunakan sebagai bahan evaluasi regulasi dan pelaku usaha

Fintech dan Reformasi Pengawasan

By Steve Antero

Dampak Positif

- Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital
- Mendorong pelaku industri untuk memperbaiki sistem penilaian risiko dan etika penagihan
- Memperkuat peran Presiden dan DPR dalam pengawasan ekonomi digital
- Menekan kasus intimidasi, pemerasan, dan bunuh diri akibat pinjaman online
- Membentuk sistem transparan karena data dikumpulkan dari laporan masyarakat terverifikasi
- Proses pengaduan masyarakat akan lebih terespon secara kongkret
- LBH akan semakin aktif terlibat dan terkontrol serta terkoordinasi dengan baik

Fintech dan Reformasi Pengawasan

By Steve Antero

Penutup: Saatnya Negara Turun Gunung

Inovasi harus tetap berpihak pada keadilan. Jangan sampai teknologi justru menciptakan jurang baru bagi masyarakat miskin. Dengan membentuk Komisi Khusus Fintech Nasional dan memberdayakan LBH Khusus Fintech, negara bisa hadir bukan hanya sebagai wasit — tetapi sebagai pembela rakyat.

Langkah ini bukan anti-fintech. Ini adalah cara untuk menjadikan fintech sebagai solusi ekonomi digital yang sehat, beretika, dan berpihak.